



■ Pemprov Bali Raih WTP untuk Keempat kalinya

WENPASAR, TRIBUN BALI Pemprov Bali memperoleh pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemprov Bali tahun anggaran 2016. Anggota BPK I, Rizal Djalil memastikan status WTP untuk Bali tak ada ongkalikong.

Dirinya sebagai anggota PK RI pusat berani menjamin bahwa penetapan WTP kepada pemprov Bali sesuai peraturan erundang-undangan dengan tandar Akuntansi Pemerintah (AP) berbasis akrual. "Sebelum saya ke sini saya panggil kepala Perwakilan BPK Bali ke TP room. Saya tanya kepala perwakilan bagaimana penilaian WTP-nya? Ada kongkalikong enggak? Dia jawab tidak da pak siap!", ujar Djalil saat sidang paripurna istimewa penyerahan laporan hasil pemeriksaan WTP Pemprov Bali i ruang sidang utama DPRD ali, Rabu (31/5).

Proses penilaian WTP diberikan kepada kementerian atau

pun lembaga apabila penyajian seluruh informasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan kelengkapan yang artinya tidak ada yang disembunyikan. Kepatuhan peraturan perundang-undangan berlaku, efektifitas dan berdasarkan sistem pengendalian internal (SIP), penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

"Proses WTP dicapai tidak mudah, berdarah-darah mengerjakan ini, siang malam, semua permintaan data dijelaskan. WTP keempat kalinya, itu dicapai dengan keringat berdarah-darah dan enggak ada kongkalikong. Makanya saya panggil kepala perwakilan sebelum masuk ke sini, enggak ada sesuatu melanggar kode etik. Tidak usah ada keraguan soal itu," jelasnya ketika dikonfirmasi kembali selepas sidang paripurna.

Pemeriksaan ini adalah proses penilaian kebenaran, kepatuhan dan penilaian daerah yang pada akhirnya membantu menciptakan pemerintahan bersih, efek-

tif, efisien. Walaupun begitu dikatakannya bahwa dari 1.318 rekomendasi senilai Rp 90,36 miliar ada 1.167 rekomendasi sudah ditindaklanjuti, 52 rekomendasi sudah ditindaklanjuti namun belum tuntas.

Kemudian 86 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 13 rekomendasi senilai Rp 17,31 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. BPK juga merasa perlu mengungkapkan beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti seperti penatausahaan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan aset. Perbaikan dalam pengelolaan investasi non permanen-dana bergulir.

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang berada disebelah Rizal Djalil langsung memberikan tanggapan bahwa Pemprov Bali memang pernah mendapatkan opini *disclaimer* karena satu diantara penyebabnya belum tertatanya aset dengan baik. Karena itu tahun 2008 ia memindahkan para PNS Pemprov Bali yang paham aset untuk dipindahkan ke Biro Aset Pemprov Bali.

"Saya bahkan mendrop 16 tamatan IPDN ke biro aset untuk menyelesaikan masalah aset Pemprov Bali," ujar Pastika yang langsung mengantarkan Rizal Djalil ke mobilnya.

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menambahkan bahwa perolehan WTP jangan dipandang sebagai normatif semata, karena ini merupakan komitmen transparansi tata kelola pemerintahan.

Disinggung soal jual beli opini WTP, Sudikerta mengatakan Pemprov Bali meraih WTP dari kerja keras bukan membeli. Untuk kasus di luar Bali bukan menjadi bagiannya dan di luar dugaannya. (agw)

RIZAL Djalil yang datang ke Pemprov Bali dengan gaya seperti anak muda yang rambutnya kimis rapi dan jas abu-abu slimfit langsung meminta wiefie selepas sidang paripurna. Ini membuat rombongan lainnya seperti Kepala BPK Perwakilan Bali, Gubernur Bali, Wakil Gu-



TRIBUN BALI/AA GDE PUTU

FOTO BERSAMA - Usai sidang penyerahan laporan hasil pemeriksaan WTP Pemprov oleh BPK RI, anggota dewan dan BPK foto bersama, Rabu (31/5).

Wefie Hingga Pantun

ubernur Bali, Ketua DPRD Bali ikut dalam wefie tersebut.

"Ini sebagai laporan kan, jadi kita laporan bahwa ini loh Bali sudah ketemu dengan Pak Gubernur," ujarnya yang membuat tawa rombongan lainnya. Selain wefie, hal lainnya yakni celotelah pantun dari Sekretaris

Komisi II DPRD Bali, Kusuma Putra. Pantun inipun diutarakannya dilorong ruang sidang utama DPRD Bali yang juga didengar kalangan anggota DPRD Bali lainnya.

"Jalan-jalan beli tempe ke Pulau Rote, Anggaran kita WTP bukan karena OTT," seloroh

Kusuma Putra yang men at anggota dewan lainnya wa. Ketua DPRD Bali, Ny Adi Wiryatama mengat tika pemeriksaan sudah ai aturan dan tidak ada langgar, maka penetapan Pemprov Bali bisa diterir cara hukum. (agw)

Edisi : Kamis, 1 Juni 2016
Hal : 5